LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN FEBUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 9 Maret 2026

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 12,84 %

b. Keuangan = 2.732.033.692 (12,69%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.100.000			4.552.500		
1	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	35.100.000	25,07	14,34	4.552.500	(10,73)	perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000			0		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandan	7.000.000	4	0	0	(4)	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.862.000			0		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	11,58	0	0	(11,58)	Menyesuaikan Kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	400.000.000			28.650.500		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Perempuan	400.000.000	32,56	7,16	28.650.500	(25,40)	Operasional BKOW hanya diambil beberapa menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	252.808.000			14.175.000		
1	Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	252.808.000	6	5,62	14.175.000	(0,38)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	9.560.000			0		
1	Penguatan Peran Forum Genre melalui Kelompok PIK Remaja Kecamatan dalam mendukung RPPA di Kecamatan Berdaya	9.560.000	34,10	0	0	(34,10)	Kegiatan belum terlaksana pada bulan februari
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	13.210.000			3.260.000		

1	Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas	13.210.000	31,49	24,68	3.260.000	(6,81)	Kegiatan sudah terlaksana pada tanggal 12 februari 2026 dengan 3 narasumber
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	9.560.000			1.800.000		
1	Pelatihan Penguatan Satyagatra dalam Peningkatan Pelayanan Keluarga Sejahtera untuk Mewujudkan Rumah Perlindungan perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya	9.560.000	34,10	18,82	1.800.000	(15,28)	Kegiatan sudah terlaksana pada tanggal 24 Februari 2026 dengan 2 Narasumber
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	8	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
2. Dikpol rencana 4 titik (KG);
3. DWP "Bazaar Ramadhan" (KG);
4. Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Bidang Ekonomi 3 titiK (aspirasi Dewan) (KG);
5. Pendidikan Politik bagi Perempuan untuk Mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender 5 titik (aspirasi Dewan) (KG);
6. Safari Pelayanan KB MKJP (KB);
7. Persiapan penguatan penggerakan pelayanan KB bersama Aisyiyah dan IBI (KIE);
8. Penguatan Peran Forum Genre melalui Kelompok PIK Remaja Kecamatan dalam mendukung RPPA di Kecamatan Berdaya melalui zoom (KS);
9. Ngopi Penak (PHA);
10. Bimbingan Masyarakat JKB by Zoom (PHA);
11. Rakor KLA Kab/Kota by Zoom (PHA);
12. Rapat Pengendalian (rutin);
13. Pembayaran gaji dan honor pengelola keuangan (rutin);
14. Operasional kantor (rutin);
15. Rehab Ruang Parahita;
16. Pengadaan Peralatan Kantor (AC Standing).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;Â
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Februari 2026, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 9 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum

NIP. 196605171990082001